

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, temuan lapangan, serta analisis yang dilakukan melalui berbagai instrumen pengumpulan data, dapat ditegaskan bahwa proses mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang merupakan dinamika yang kompleks dan berlangsung secara berkelanjutan. Upaya mitigasi ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta kelembagaan yang saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas penanganan bencana. Proses pengurangan risiko bencana tidak dapat bergantung pada satu aktor saja, tetapi menuntut keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat secara terstruktur. Peningkatan kapasitas mitigasi juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan kebijakan maupun kesiapan teknis di tingkat pemerintah daerah, melainkan membutuhkan pola kerja sama yang terintegrasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang adaptif, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan di wilayah pesisir. Dengan demikian, simpulan utama dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance* dalam mitigasi penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Collaborative Governance yang diterapkan dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas menunjukkan keterlibatan aktif berbagai aktor seperti

BPBD, Dinas PU, BBWS, pemerintah kelurahan, FPRB, dan masyarakat. Kolaborasi sudah berjalan melalui koordinasi rutin, pembagian peran yang jelas, serta komunikasi yang terbuka dalam forum diskusi. Kehadiran forum FPRB menjadi wadah yang efektif untuk menyelaraskan pemahaman dan mengembangkan strategi teknis yang dibutuhkan di wilayah pesisir yang memiliki risiko tinggi. Walaupun proses kolaborasi dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas sudah berjalan, namun pada pelaksanaannya masih didapati beberapa hambatan seperti pada dialog tatap muka masih adanya miskomunikasi, perbedaan pendapat maupun kewenangan, sistem informasi yang kurang merata. Sedangkan dari membangun kepercayaan masih didapati kurang percayanya publik terhadap program pemerintah dikarenakan kurang cepat tanggapnya pemerintah terhadap penanganan banjir rob. Pada komitmen pada proses kolaborasi juga masih adanya mekanisme komunikasi yang belum optimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob

Faktor pendukung utama dalam proses kolaborasi adalah hubungan koordinatif yang solid antar instansi serta komitmen bersama untuk mengatasi masalah banjir rob. Struktur komunikasi yang jelas mempermudah proses distribusi informasi sehingga program penanganan dapat berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat proses kolaboratif karena masyarakat berperan dalam pemantauan, pelaporan, dan tindakan awal ketika banjir terjadi.

Namun terdapat pula hambatan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program tidak berjalan optimal.

Selain itu perbedaan prioritas antarinstansi sering memperlambat proses pengambilan keputusan. Regulasi teknis yang belum sepenuhnya sinkron juga menghambat kelancaran koordinasi. Meski demikian hambatan tersebut dapat diminimalkan karena adanya komitmen bersama serta kesadaran bahwa penanganan banjir rob adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat pesisir.

4.2. Saran

Menurut hasil penelitian penulis menemukan gap penelitian *Collaborative Governance* dalam mitigasi penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dan Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob. Terdapat saran yang ditulis peneliti, sebagai berikut:

1. Penguatan mekanisme *Collaborative Governance*

Disarankan saran yang dapat diajukan berfokus pada penguatan kualitas proses *Collaborative Governance* agar kolaborasi yang sudah berjalan tidak hanya bersifat formal, tetapi semakin efektif dalam menjawab persoalan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Pemerintah daerah bersama aktor terkait perlu memperkuat mekanisme dialog tatap muka yang lebih terstruktur dan inklusif, misalnya dengan penjadwalan pertemuan lintas instansi dan masyarakat secara rutin dengan agenda yang jelas, sehingga potensi miskomunikasi, perbedaan pendapat, maupun tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, diperlukan standarisasi alur koordinasi dan kejelasan pembagian peran antaraktor agar setiap pihak memahami batas dan tanggung jawabnya dalam proses mitigasi.

Di sisi lain, upaya membangun kepercayaan publik perlu menjadi perhatian utama melalui peningkatan responsivitas dan transparansi pemerintah dalam penanganan banjir rob. Informasi terkait program, progres kegiatan, serta kendala yang dihadapi sebaiknya disampaikan secara terbuka dan merata kepada masyarakat melalui sistem informasi yang mudah diakses. Penguatan fungsi FPRB sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting, tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi sebagai ruang evaluasi bersama terhadap komitmen dan kinerja kolaborasi. Dengan demikian, komitmen pada proses kolaborasi dapat terjaga secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan efektivitas mitigasi banjir rob di wilayah pesisir Kelurahan Tanjung Mas.

2. Penguatan faktor pendukung dan penanganan faktor penghambat

Memperkuat faktor pendukung dalam proses kolaborasi diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui program edukasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala. Masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan drainase, pembersihan jalur air, dan pemantauan potensi banjir sehingga peran mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi sebagai bagian dari sistem mitigasi. Upaya ini penting agar kesadaran kolektif dapat terbangun secara konsisten.

Dalam mengatasi faktor penghambat pemerintah perlu memperjelas regulasi teknis antarinstansi agar batas kewenangan dan pembagian tugas lebih terarah. Sinkronisasi program antarinstansi juga harus ditingkatkan agar perbedaan prioritas tidak menghambat kerja sama. Selain itu pemerintah perlu merancang rencana penanganan jangka panjang yang fokus pada adaptasi kawasan pesisir

sehingga proses kolaborasi tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi mampu membangun ketahanan wilayah terhadap ancaman banjir rob di masa depan.

4.3. Rekomendasi

Berdasarkan kajian analisis kualitatif dan teori dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penguatan Proses Kolaborasi Antar Instansi

Pemerintah perlu memperkuat ruang koordinasi antara BPBD, Dinas PU, BBWS, kelurahan, dan masyarakat agar proses dialog lebih terarah. Koordinasi yang rutin akan membantu menyatukan persepsi, meningkatkan kepercayaan, serta memperjelas peran masing-masing pihak dalam penanganan banjir rob.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Dukungan Operasional

Instansi yang terlibat perlu mendapatkan dukungan yang lebih memadai, baik dari sisi armada, teknologi pemantauan, maupun struktur kerja di lapangan. Dengan kapasitas yang lebih kuat, hambatan teknis seperti keterbatasan peralatan dan lambatnya respons dapat dikurangi sehingga mitigasi dapat berjalan lebih efektif.

3. Penguatan Literasi dan Partisipasi Masyarakat

Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah mitigasi. Pelatihan, sosialisasi, dan simulasi lapangan dapat mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dan mendukung proses kolaborasi dengan instansi pemerintah.